

KACA TINGAL “ AKUNTABILITAS “ APBD PRO RAKYAT DALAM BINGKAI SEKOLAH GRATIS JENJANG SMA/SMK (Studi Kasus Pada Kota Blitar)

Henny Indarri Yanti
Universitas Jember, Indarrhenny@gmail.com

Abstrak

Salah satu cara membangun manusia adalah melalui dunia pendidikan. Pemerintah kota blitar mencoba mengimplentasikan bagaimana masyarakatnya bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Melalui Program APBD Pro Rakyat mencanangkan sekolah gratis bagi masyarakatnya. Pada Penelitian ini mengambil fokus pada Pendidikan Tingkat SMA/SMK Perwakilan kota blitar. Bagaimana pihak sekolah dan dinas terkait mengelola anggaran yang di gunakan. Dan salah satu pelayanan pemerintah yang harus disediakan untuk publik adalah bentuk tranparansi serta akuntabilitas untuk apa dan seperti apa penggunaan Anggaran tersebut.

Kata kunci : Akuntabilitas, APBD Prorakyat, Transparansi

Abstract

One way to build a human being is through education. Blitar city government tries to implement how its community can get a good education. Through the Pro People's Program APBD proclaimed free schools for the community. In this research fokos take on High School Education Level / SMK Representative of blitar city. How the school and related agencies manage the budget in use. And one of the government services that must be provided to the public is the form of transparency and accountability for what and what the use of the Budget is.

Keywords: Accountability, APBD Prorakyat, Transparency

PENDAHULUAN

Dalam era yang smakin maju masyarakat di tuntutan untuk dapat slalu bebenah, mulai dari tata cara kehidupan maupun teknologi yang digunakan. Tidak hanya masyarakat akan tetapi pemerintah diharapkan mampu bebenah, baik itu dalam hal pelayanan maupun kebijakan yang dikeluarkan. Pasca terjadi krisis ekonomi terjadi mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik dan system pemerintahan pada umumnya. (Kumorotomo ,2010:3) Setelah melihat bahwa birokrasi publik selama ini hanya di jadikan sebagai alat politik bagi rezim yang berkuasa, rakyat kini sulit untuk menghargai apa yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, birokrat, atau unsur-unsur lain yang terdapat dalam birokrasi publik, karena itu tugas pokok para pembuat keputusan dalam beberapa tahun setelah gerakan reformasi adalah memperoleh kembali kepercayaan masyarakat seraya membuktikan bahwa seluruh proses politik dan pembuatan kebijakan yang terjadi memberi keuntungan bagi segenap unsur rakyat. Dengan kata lain, akuntabilitas birokrasi publik akan menjadi titik krusial bagi arah perkembangan demokrasi di Indonesia dalam waktu dekat ini. Hal tersebut sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan target bersama dalam konsep pembangunan *Milenium development Goals* [MDGs] akan tetapi konsep tersebut tergantikan dengan *Sustainable Development Goals* [SDGs]. Maka dari itu Dengan adanya permasalahan di atas untuk itu pemerintahan harus serta wajib menciptakan

pemerintahan yang bersih, transparan dan jujur. Pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai pemerintahan yang baik (*good government governance*). Pemerintahan yang baik itu hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih (*clean government*), dengan aparatur birokrasi yang terbebas dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Dalam rangka mewujudkan *Clean Government*, pemerintah harus memiliki moral dan proaktif mewujudkan partisipasi serta *check and balances* (memeriksa saldo) (Flotin, 2008 : 78, 3) Pemerintah telah mencanangkan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Corporate Governance*), yang terdiri dari tiga pilar yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas (Halim, E. Restianto, dan karman 2010:30).

Untuk meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara melalui system akuntansi pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintah yang baik (*Good Governance*) di tetapkan Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Halim, E. Restianto, dan karman 2010:29). Saat ini sudah dikeluarkan SAP nomor 71 tahun 2010, di Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP) undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD di susun dan disajikan sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana pengaruh transparansi Akuntabilitas terhadap APBD Prorakyat dalam bingkai sekolah gratis serta fasilitas yang diberikan oleh program tersebut. Selain itu yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh transparansi Akuntabilitas terhadap APBD Prorakyat.

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik Mardiasmo (2006:3), sementara Kumorotomo, (2010:4) menjelaskan Akuntabilitas (*Accountability*) adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya.

Berdasarkan definisi akuntabilitas di atas menurut Ferlie et al (1997:202-216) [kumoroto, 2005:4,] dibedakan beberapa model akuntabilitas yakni :



Gambar 1. Model akuntabilitas menurut ferlie et al (1997)

Dua model akuntabilitas yang pertama sesungguhnya tidak banyak berbeda dengan konsep-konsep tentang kontrol, pengawasan atau pengendalian di dalam birokrasi publik. Kemudian konsep *accountability downwards* terkait dengan konsep demokrasi partisipatif, bahwa aktivitas politik dan pelayanan publik harus memiliki kaitan yang erat dengan proses konsultatif dan kerjasama antar wakil rakyat dan masyarakat pada tingkat lokal. Sedangkan konsep *market-based forms of accountability* mengutamakan adanya kompetensi dan mekanisme pasar yang memungkinkan rakyat memiliki pilihan lebih banyak terhadap kualitas pelayanan yang dikehendakinya. Pemerintah harus mampu memperluas alternatif penyedia pelayanan publik serta menunjang informasi atau menetapkan standart yang dapat menjamin adanya akuntabilitas yang baik di dalam pelayanan publik. Kemudian juga terhadap konsep *self-accountability* yang pada dasarnya merupakan proses akuntabilitas internal yang sangat tergantung kepada penghayatan mengenai nilai-nilai moral atau etika para pejabat birokrat yang melaksanakan tugas pelayanan publik (kumoroto, 2005:4-5).

Oleh karena itu dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, seperti dikutip (LAN) Lembaga Administrasi Negara dan (BPKP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2000) yaitu sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Terdapat beberapa macam tipe akuntabilitas Menurut Ihyaul Ulum dalam bukunya "Akuntansi Sektor Publik" yaitu :



Gambar 2. Tipe akuntabilitas menurut Ihlayul Ulum

Akuntabilitas Internal Berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah, dimana setiap pejabat/petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Akuntabilitas Eksternal Melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Selanjutnya akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Hapwood dan Tomkins juga Elwood yang diterjemahkan oleh Mahmudi dalam bukunya "Manajemen Sektor Publik", bahwa Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain (Mardiasmo,2002:22):



Gambar 3. Macam-macam Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana public (Yulivastra,2002:2). Akuntabilitas manajerial terkait apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

Terkait dengan Akuntabilitas kebijakan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Menurut (Mardiasmo, 2002:21) Dalam pelaksanaannya Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi. Terwujudnya akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, bukan hanya sekedar pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. Sedangkan APBD, Anggaran adalah akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi sebagai instrument kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan Negara (Nordian, 2005:14). Dan APBD Pro rakyat merupakan program walikota, konsep yang untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperdayakan masyarakat kota blitar.

Dalam pelaksanaan APBD PRO RAKYAT selain di pertanggungjawabkan dengan baik juga harus di transparansi ke masyarakat. Krina (2003:13) mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Oleh karena itu Menurut Muhammad (2007:46), upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan transparansi sekolah kepada publik, antara lain :

1. Pendayagunaan berbagai jalur komunikasi baik langsung dan tidak langsung melalui temu wicara maupun media cetak maupun elektronik.
2. Menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi, bentuk informasi yang dapat diakses publik dan informasi yang bersifat rahasia.
3. Membuat prosedur pengaduan apabila informasi tidak sempat ke publik.
4. Membuat peraturan yang menjamin hak publik untuk mendapatkan informasi sekolah, fasilitas data base dan sarana informasi dan komunikasi.

Keberhasilan transparansi sekolah ditunjukkan oleh indicator sebagai berikut:

- a. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan publik kepada sekolah bahwa sekolah adalah bersih dan berwibawa.
- b. Meningkatkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan sekolah.
- c. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan sekolah
- d. Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Muhammad, 2007).

Studi ini mengupas tentang APBD kota Blitar, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan ditetapkan peraturan daerah. Dari penjelasan di atas Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi, sebagai instrument kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara (Nordiawan, 2007:14). Dalam upaya meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR atau DPRD dan pemerintahan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD 1945. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam UU nomor 17 tahun 2013 disebutkan bahwa belanja Negara atau daerah di perinci sampai unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja harus mendapat persetujuan DPR atau DPRD (Nordiawan, 2007:14).

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standart Akuntansi Pemerintah yang telah diterima secara umum. Kemudian Dalam UU no 17 tahun 2003 diterapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan berupa laporan keuangan setidak – tidaknya terdiri atas : Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan arus kas, dan Catatan atas laporan. Keempat point tersebut disusun dengan Standart Akuntansi Pemerintah (Nordiawan, 2007 :16).

Kemudian dijelaskan proses penyusunan APBD mulai dari (1) Penyusunan kebijakan umum APBD, (2) Penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara, (3) Penyiapan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD, (4) Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD, (5) Penyiapan rancangan peraturan daerah APBD, (6) Evaluasi rancangan peraturan daerah APBD (Nordiawan, 2007: 45-46). Selanjutnya Pelaksanaan APBD mulai dari (1) Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) (2) Penyusunan anggaran kas (3) Surat penyediaan dana (4) Surat permintaan pembayaran (5) Surat perintah membayar (6) Surat perintah pencairan dana Pelaksanaan belanja (7) Surat pertanggungjawaban pengeluaran (Nordiawan, 2007 : 88-95).

Dasar hukum dalam penyelenggaraan keuangan daerah dan pembuatan APBD adalah sebagai berikut:

1. UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.
2. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

3. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan, dan Penghitungan APBD.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 mengenai suatu Pengelolaan Keuangan Daerah dikatakan ialah, bahwa pendapatan daerah adalah suatu hak pemerintah daerah yang diakui ialah sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih. Penerimaan daerah adalah suatu uang yang masuk ke suatu daerah dalam periode thn anggaran tertentu.

Pada Undang-undang Nmr 25 Thn 1999 Pasal 21 menggemukan, bahwa suatu anggaran pengeluaran dalam APBD tersebut tidak dapat atau tidak boleh melebihi anggaran penerimaan. Didalam penjelasan pasalnya tersebut, ialah daerah tidak dapat atau tidak boleh mengganggu pengeluaran tanpa adanya kepastian terlebih dahulu tentang ketersediaan sumber pembiayaannya serta juga mendorong daerah untuk dapat meningkatkan efisiensi pengeluarannya. Searah dengan hal itu Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah menggemumkan, ialah bahwa jumlah belanja yang dianggarkan didalam suatu APBD adalah suatu batas tertinggi untuk pada tiap-tiap jenis belanja.

Pada Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain yaitu

1. Fungsi otorisasi adalah Anggaran daerah tersebut menjadi dasar untuk dapat melaksanakan pendapatan serta belanja daerah ditahun bersangkutan,
2. Fungsi perencanaan adalah Anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman bagi manajemen didalam merencanakan suatu kegiatan pada tahun yang bersangkutan,
3. Fungsi pengawasan adalah Anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman untuk dapat menilai apakah kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan,
4. Fungsi alokasi adalah Anggaran daerah tersebut harus diarahkan untuk dapat menciptakan lapangan kerja atau juga mengurangi pengangguran serta pemborosan sumber daya, dan juga meningkatkan efesiensi & efektifitas perekonomian
5. Fungsi distribusi adalah Anggaran daerah tersebut harus memperhatikan pada rasa keadilan dan juga kepatutan, dan
6. Fungsi stabilitasi Adalah Anggaran daerah tersebut menjadi alat untuk dapat memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian suatu daerah (Nordawan, 2007:39) Adapun yang menjadi pilar dari sebuah APBD Prorakyat sebagai berikut:
 1. APBD PRO RAKYAT berorientasi agar masyarakat kota blitar menjadi masyarakat yang religius , beriman , dan bertaqwa kepada tuhan YME.

2. Kami ingin masyarakat kota blitar tidak lapar
3. Agar masyarakat kota blitar tidak sakit
4. Wasis (agar pandai & tidak bodoh)
5. Masyarakat senantiasa dalam suasana yang aman & kondusif
(sumber : kantor BPKAD kota blitar).

Ada empat hal dalam penyusunan APBD pro rakyat serta menjalankan fungsi pemerintahan yakni, Partisipasi, dimana warga mendapatkan ruang berpartisipasi dalam proses perencanaan, pembangunan yang secara utuh dan lengkap. Akses, warga mendapatkan akses pelaksanaan pembangunan. Manfaat, warga menerima manfaat langsung dari pembangunan dari berbagai level perwujudannya, serta tentunya Kontrol, dimana warga dapat mengevaluasi proses dan hasil program pembangunan dan terlibat dalam menentukan kelanjutannya .

METODOLOGI

Pada proses penelitian ini mencoba mengimplementasikan metode fenomenologi guna dapat memahami budaya lewat pandangan pemilik budaya atau pelakunya. Menurut paham fenomenologi, ilmu bukanlah *value free*, bebas nilai dari apa pun, melainkan *bound*, melainkan hubungan dengan nilai. Menurut edie (1962:19), fenomenologi berusaha menunjukkan struktur implicit dan makna dari pengalaman manusia, yang merupakan pencarian “ensensi” yang tidak dapat di temukan dengan pengamatan biasa. Fenomenologi adalah ilmu dari sruktur esensial kesadaran atau pengalaman yang tidak menekankan pada pengalaman ataupun objek dari pengalaman, melainkan pada titik kontak di mana “ *being and consciousness*”. Inti fenomenologi adalah untuk mendapatkan visi yang murni tentang “*essentially is*” .

Selanjutnya berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan atas dua, yaitu data primer dan data sekunder (Hasan , 2008, dikutip dari Iskandar, 2013, hal.204)

- a) Data Primer; biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original (Kuncoro, 2003:127). Dalam penelitian ini, data primer berupa pertanyaan peneliti dan jawaban responden melalui kuesioner yang akan dibagikan kepada responden.
- b) Data Sekunder; biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2003:127). Dalam penelitian ini penulis mengambil data yang terkait relevan dengan masalah yang diangkat sebagai bahan dan materi dalam pembahasan ini.

Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif dalam usaha memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan atau materi pembahasan, maka pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan (Field Research) yang menggunakan beberapa metode yaitu Observasi, Wawancara, Kuesioner.

Obyek dalam penelitian ini mengambil lokasi di kota blitar melalui badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kota blitar dan beberapa Sekolah jenjang SMK dan SMA perwakilan kota blitar dengan waktu penelitian selama, kurang lebih delapan bulan dan sempat terhenti beberapa bulan mengingat kondisi kebijakan sekolah yang menjadi objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun dana yang harus di keluarkan oleh APBD PRO RAKYAT kota blitar adalah dengan pendapatan 765.861.123.558,53, dengan belanja urusan wajib 826.317.276.129,70, untuk pendidikan pemerintah mengeluarkan dana sebesar 320.761.214.412,41 , untuk kesehatan 146.553.350.228,61 , dan untuk pembangunan 6.406.714.125,49,dengan anggaran pendidikan 46 persen dari total APBD Kota blitar yang besarnya Rp. 782, 8 miliar, pemkot membiayai pendidikan seluruh siswa di semua jenjang. Tidak hanya biaya operasional, pemkot juga menggratiskan biaya pakaian, buku, dan kebutuhan lain (sumber : BPKAD kota blitar).

1. Pengaruh Akuntabilitas Dalam Program Sekolah Gratis Kota Blitar

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan di susun dengan mengikuti Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum (Halim, E. Restianto, dan karman 2010:47).

Dalam good governance, akuntabilitas publik merupakan elemen terpenting dan merupakan tantangan utama yang dihadapi pemerintahan dan pegawai negeri. Akuntabilitas berada dalam ilmu social yang menyangkut berbagai cabang ilmu social lainnya, seperti ekonomi, administrasi, politik, perilaku, dan budaya. Selain itu, akuntabilitas juga sangat terkait dengan sikap dan semangat bertanggungjawaban seseorang. Akuntabilitas secara filosofi timbul karena adanya kekuasaan yang berupa mandat / amanah yang diberikan kepada seseorang atau pihak tertentu untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung yang ada (Halim, E. Restianto, dan karman 2010:67).

Disini peran akuntabilitas dalam penyelenggaraan sekolah gratis di kota Blitar belum cukup transparan dengan adanya informasi yang jelas dan melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam pemberian anggaran untuk program sekolah gratis, sehingga memberikan gambaran yang jelas alur program tersebut, dan jika terjadi permasalahan akan kelihatan dan bisa di telusuri karena sudah melalui prosedur.

Untuk penerimaan dan pengeluaran daerah (APBD) harus dimonitor, yaitu dibandingkan antar yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians dan tindakan antisipasi ke depan (Halim, E. Restianto, dan karman, 2010:91).

Selain itu akuntabilitas yang transparan akan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. Mampu memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional. Maka dari itu dengan adanya akuntabilitas maka program pendanaan dari APBD pro rakyat untuk sekolah gratis akan berjalan dengan baik karena laporan akuntabilitas di buat secara transparan, sehingga akan jelas rincian dana yang dikeluarkan dan tidak terjadi kesalah pahaman antara masyarakat.

Untuk masyarakat sendiri akan lebih bersemangat untuk menyekolahkan putra putrinya sampai pendidikan yang lebih tinggi karena mereka lebih berkonsentrasi untuk mencari uang untuk hidup setiap harinya. Pertanyaan dan penilaian masyarakat itu tidak ada salahnya tentang komposisi belanja dalam APBD terutama belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung diasumsikan untuk kepentingan masyarakat dan sebaliknya belanja tidak langsung dianggap tidak untuk masyarakat tetapi lebih untuk kepentingan birokrat. Banyak pula komponen anggaran “disembunyikan” yang dialokasikan harusnya untuk masyarakat dimasuk dalam belanja tidak langsung. Banyak sekali caranya seperti belanja hibah, bantuan sosial (bansos), dan bantuan keuangan kota hingga desa.

Selama ini menjadi rahasia umum bahwa kecenderungannya adalah prioritas penggunaan APBD atau perubahan untuk membiayai belanja rutin birokrasi, dan sisanya untuk pembangunan. Dan itu sama sekali tidak menjamin demokratisasi dalam rancangan pembangunan. Jika ingin menjamin penyusunan APBD atau perubahan pro masyarakat atau publik, harusnya penyusunan APBD atau perubahan itu secara; Partisipasi. Masyarakat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pembangunan secara utuh. Akses, warga mendapatkan akses pelaksanaan pembangunan. Manfaat, warga menerima manfaat langsung dari pembangunan dari berbagai level perwujudannya. Kontrol, warga dapat mengevaluasi proses dan hasil program pembangunan dan terlibat dalam menentukan kelanjutannya.

2. Fasilitas Yang Di Peroleh Dalam Program Sekolah Gratis Di Kota Blitar
Pemerintah Kota Blitar telah berupaya semaksimal mungkin memajukan dunia pendidikan. Pembebasan biaya pendidikan mulai dari SD sampai dengan SMA merupakan salah satu langkah kongkret dan bukti keseriusan pemerintah untuk meningkatkan pendidikan masyarakatnya. Pemerintah Kota Blitar meyakini bahwa dengan majunya dunia pendidikan dapat membentuk generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkompeten. Fasilitas pendidikan yang ada di Kota Blitar sebanyak 71 SD, 25 SLTP, 27 SLTA dan 8 perguruan tinggi. Total jumlah murid untuk tingkat SD sebanyak 18.498 murid, SLTP 11.515 murid, SLTA 16.808 murid dan perguruan tinggi 5.809 mahasiswa. Adapun rasio guru murid terbesar di level SD yaitu 1:18 yang artinya setiap satu orang guru menangani 18 murid. Secara umum rasio guru murid di Kota Blitar masih cukup memadai (Sumber : BPS kota blitar, 2017 : 9).

Untuk program APBD pro rakyat di kota blitar itu berlaku untuk semua anak yang berdomisili di kota blitar. Untuk sekolah SMA dan SMK tersebut berlaku untuk sekolah negeri dan swasta di kota blitar (sumber : DIKDA kota blitar)

Untuk siswa yang berdomisili di kota blitar tanpa terkecuali anak smk/ swasta semua mendapat bantuan secara merata dari program APBD pro rakyat di kota blitar. Seperti yang disampaikan laras siswi SMK:

“iya mbak slama iki aku nrima beberapa paket, mulai sabuk , kaos kakik, seragam sak ongkos jahit e sampek spp ku yo gratis “. [iya mbak saya menerima beberapa paket, mulai ikat pingang, kaos kaki, seragam juga biaya jahit'ya .sampai spp saya juga gratis]

Walaupun mereka bebas SPP , para siswa juga di harapkan masih menabung yang mana tabungan tersebut digunakan untuk keperluan lainnya yang tidak termuat dalam kebijakan pemerintah terkait sekolah gratis nya. Misal nya studi tour atau kunjungan industry bagi siswa kejuruan, yang mana hal tersebut di paparkan oleh salah satu siswi dari SMK Negeri.

..” mbayar mbak , nanging mung Rp . 117.000lan bebas saben semester mbak . Nanging saben sasi ing sekolah duwe jeneng bank mini sing tumrap siswa iku kanggo nabung segede 25.000 / anak mbak [bayar mbak , tapi Cuma Rp. 117.000 dan bebas setiap semesternya mbak. Namun setiap bulan di sekolah ada namanya bank mini yang diwajibkan siswa itu menabung sebesar Rp.25.000/ anak mabk].

Selain SPP yang gratis para siswa juga berkesempatan untuk mendapatkan tablet serta wifi gratis di sekolahnya.

....” Aku iya bisa oleh tablet gratis mbk, nanging mengko ing nalika wes lulus iku kudu di baliknow imenyang keadan wektu dhisikan diwenehi, ing sekolah ana hotspot gratis. Dadi akeh sing luwih gampang kanggo kula kanggo sinau . sak liane tablet aku uga oleh seragam putih, seragam pramuka, seragam batik, olahraga, sepatu, tas, sabuk, kasut, topi lan atribut liane tanpa biaya opo-opo. Kanggo seragam, padha uga oleh ragad per seragam 280.000 ...” [saya juga dapat tablet gratis mbk, namun nanti kalau sudah lulus harus dikembalikan dengan keadan waktu awal diberikan , di sekolah juga ada hotspot gratis mbk. Jadi lebih mudah buat belajar. selain tablet aku dapatnya seragam abu putih, seragam pramuka, seragam batik, olahraga, sepatu, tas, ikat pinggang, kaos mbki, topi dan atribut lainnya juga gratis tanpa di pungut biaya apapun. Untuk seragam mereka juga mendapat ongkos jahit sekalian per seragam 280.000.]

Dengan adanya program yang telah di implentasikan sesuai dan tepat sasaran yang berlandaskan Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2011, dijalankan program rintisan wajib belajar 12 tahun. Seluruh biaya ditanggung APBD alias gratis. Semua siswa yang berdomisili dan bersekolah di Kota Blitar, merasakan langsung dampak positif kebijakan. Diharapkan program tersebut akan membawa kesejahteraan terhadap penerus bangsa.

KESIMPULAN

Salah satu keberhasilan seorang kepala daerah dalam memimpin dan mengelola suatu daerah yang di pimpinya adalah dengan terserapnya anggaran dengan baik serta tepat sasaran. selain hal tersebut juga dalam pelaporannya dapat diterima masyarakat serta lembaga terkait yaitu transparansi dan akuntabel. APBD pro rakyat kota blitar yang di laksanakan oleh walikota blitar sangat bermanfaat bagi warga kota blitar terutama di bidang pendidikan sekolah gratis, baik anak didik akan tetapi juga orang tua. Hal tersebut adalah salah satu cara yang di coba pemerintah kota blitar dalam memerangi kebodohan dengan mengimplentasikan sekolah gratis diharapkan generasi yang lahir, berkembang dan besar di kota blitar mampu mendapatkan pendidikan yang layak di kotanya. Sebagai wujud dari tranparansi penggunaan anggaran dari program pemerintah melibatkan warga masyarakat untuk mengawasi serta mengontrol nya, selain dari pada itu salah satu keberhasilan kota dapat dilihat dari tingkat kecerdasan seorang generasi mudanya, dan hal tersebut dapat di cetak melalui dunia pendidikan dan pendidikan yang baik ialah apabila antara keluarga pemerintah serta yang dididik mampu bekerjasama dengan baik pula. ***Urip iku urup, membangun manusia dengan hati, all for one, one for all.***

DAFTAR PUSTAKA

- Edie, J. M. 1962. *What is phenomology?*.chicago: quadrangle books,inc.
- Flotin , craig = *Unrest in Government Accounting* , The CPA Journal . Mei 2008 : 78, 3 *Accounting and Tax* page 26
- Halim Abdul, Yanuar E. Restianto, I Wayan Karman. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Public*. Yogyakarta: Cetakan Pertama UPP STIM YKPN.
- Ihyaul Ulum, MD. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Krina, P. 2003. *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akunbilitas Tranparansi Dan Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Publik Governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2008. *Akuntabilitas Birokrasi Public (Sketsa Pada Masa Transisi)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Mahmudi (2010), *Manajemen Kinerja Sektor Public*, Edisi Ke Dua,UPP STIM YKPN Yogyakarta
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2004. *Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik*. Suatu Sarana Good Governance.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Public Melalui Akuntansi Sektor Public*, Suatu Saran Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol 2 No. 1.
- Maise yulivestra , *akuntablitas pelayanan publik antara etika dan formalisme* vol 1 no 2 april 2012
- Muhammad, Arni, 2007. *Komunikasi Organesai*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nordiawan, D. Is Putra, Dan M. Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Cetakan Pertama. Penerbit: Salemba Empat.
- BPS Kota Blitar 2015 Kantor Secretariat BPKAD Kota Blitar)

BPS Kota Blitar 2017 Kantor Sekretariat BPKAD kota Blitar

LAN Dan BPKP. 2000. Akuntabilitas Dan Good Governance. Penerbit LAN.

Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2011

SAP Nomor 71 Tahun 2010. Di SAP Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Dalam Pasal 32

Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Blitar
Perturan Walikota Blitar Nomor: 37 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UU No. 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara.